

POTENSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA ALAM BUWUN MAS GUNA MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN LOMBOK

Krimon Nusantara Saksi
Manajemen Divisi Kamar, Politeknik Pariwisata Lombok
krismon@ppl.ac.id

ABSTRACT

The shift towards sustainable tourism aims to balance ecological preservation and local economic benefits. Buwun Mas Village in Lombok possesses immense natural potential, including pristine savannas and mangrove ecosystems. However, this potential is currently threatened by structural and institutional barriers. This study aims to evaluate the development potential of Buwun Mas's natural attractions and formulate a sustainable tourism management strategy. This research employed a qualitative approach with an intrinsic case study design. Data were systematically collected through in-depth interviews with key local stakeholders, moderate participant observation assessing the fundamental tourism components, and document analysis. The results indicate that, while the natural attractions are highly competitive, poor road accessibility and inadequate basic amenities severely limit tourists' length of stay and the resulting economic multiplier effects. Furthermore, the local Tourism Awareness Group faces significant institutional challenges, including a lack of independent financial capacity, limited digital marketing literacy, and a lack of strategic external partnerships. Consequently, the gap in strict local environmental regulations has led to physical degradation, such as savanna erosion caused by illegal off-road activities. In conclusion, transforming Buwun Mas into a sustainable tourism destination cannot rely solely on its natural beauty. It necessitates a collaborative intervention where the regional government must prioritise fundamental infrastructure development, while the village authority must immediately enact binding ecological conservation regulations to prevent future exploitation.

Keywords: Buwun Mas, Community-Based Tourism, Ecotourism, Sustainable Tourism, Tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri terbesar di dunia yang terus mengalami transformasi signifikan menuju pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan inklusif. Transformasi ini didorong oleh kesadaran global akan dampak negatif dari pariwisata massal yang sering kali merusak keseimbangan ekologis dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal. Konsep pariwisata berkelanjutan kini menjadi paradigma utama yang diadopsi oleh berbagai negara untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam selaras dengan perlindungan lingkungan jangka panjang (Gössling, Scott, & Hall, 2021). Pilar utama dari pariwisata berkelanjutan mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya, dan kelestarian lingkungan hidup yang harus dikelola secara komprehensif (Maradita & Aprirachman, 2024).

Lebih lanjut, penerapan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan daya saing suatu destinasi di pasar global secara signifikan (Font et al., 2023). Oleh karena itu, kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat krusial dalam merumuskan kerangka kerja kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim serta dinamika pasar (Khan et al., 2021). Keberhasilan paradigma ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi meminimalkan dampak negatif sekaligus

memaksimalkan manfaat ekonomi bagi warga setempat.

Di Indonesia, pengembangan pariwisata berkelanjutan telah menjadi agenda prioritas nasional guna memaksimalkan potensi kekayaan alam dan budaya yang tersebar di berbagai kepulauan. Pemerintah secara aktif mendorong transisi destinasi wisata dari sekadar mengejar kuantitas pengunjung menjadi kualitas pengalaman yang sangat memperhatikan pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat adat. Fenomena ini memunculkan banyak desa wisata baru yang didesain untuk merepresentasikan kearifan lokal sekaligus melindungi ekosistem sekitarnya dari ancaman komersialisasi berlebihan. Keberhasilan pengembangan desa wisata semacam ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan serta partisipasi aktif dari penduduk lokal dalam mengelola sumber daya eksternal yang masuk (Sayuti, 2023).

Selain itu, faktor kewirausahaan di pedesaan memainkan peranan krusial dalam menentukan keberlanjutan sebuah desa wisata melalui inovasi produk yang ramah lingkungan dan kompetitif (Utami, Dhewanto, & Lestari, 2023). Di sisi lain, definisi dan tantangan mengenai pariwisata pedesaan juga menuntut pendekatan tata kelola yang spesifik dan terukur agar tidak terjebak pada eksploitasi semata (Rosalina, Dupre, & Wang, 2021). Pendekatan inovatif seperti Community-Based Tourism (CBT) telah terbukti menjadi instrumen yang sangat efektif

untuk pengembangan masyarakat, di mana komunitas lokal memiliki kontrol penuh atas manajemen destinasi (Lina, 2023).

Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan kunjungan yang sangat pesat. Namun demikian, mobilitas wisatawan di wilayah Lombok–Sumbawa masih menunjukkan polarisasi spasial, di mana konsentrasi pengunjung sering kali hanya terpusat pada beberapa titik utama, sehingga pemerataan ekonomi belum terjadi secara menyeluruh (Raudatul, 2025). Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting dalam menyusun manajemen pariwisata yang mampu mendistribusikan wisatawan ke daerah-daerah penyangga (Sari, 2024).

Lombok Barat merupakan salah satu wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alternatif guna memecah konsentrasi massa tersebut melalui berbagai tawaran keindahan alam yang memukau. Konsep pendekatan partisipatif seperti "Patju Radja" di Lombok Barat menunjukkan bahwa keterlibatan kultural dari masyarakat dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan (Muhamad & Darmawan, 2025). Selain itu, partisipasi aktif komunitas juga sangat menentukan dukungan warga terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata di area pedesaan (Bajrami et al., 2020). Melalui distribusi spasial yang lebih merata dan pelibatan masyarakat lokal, wajah pariwisata Lombok berpotensi besar untuk bertransformasi menjadi lebih tangguh di masa depan.

Salah satu kawasan di Lombok Barat yang memiliki potensi alam luar biasa untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata berkelanjutan adalah Desa Buwun Mas di Kecamatan Sekotong. Kawasan ini dikenal karena lanskap geografisnya yang sangat unik, memadukan keindahan perbukitan savana yang hijau, area hutan mangrove yang lebat, serta garis pantai yang eksotis. Potensi wisata alam ini menuntut eksplorasi yang cermat dan strategi pengembangan yang matang dengan menggunakan pendekatan komponen dasar pariwisata atau 4A, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ansiliasi (Anggara, Taufik, & Mandala, 2024). Daya tarik Buwun Mas semakin menonjol seiring dengan rencana tata ruang pemerintah daerah yang menetapkan pembagian zona unggulan, seperti wisata bahari bertaraf internasional di Teluk Belongas.

Lebih dari itu, pelibatan aktif dan dukungan dari masyarakat dalam menginisiasi tata kelola pariwisata desa merupakan determinan mutlak untuk mencapai kesuksesan otonomi daerah jangka panjang (Rasoolimanesh, Jaafar, & Ahmad, 2022). Pengelolaan yang baik juga menuntut adanya pemahaman infrastruktur digital dari masyarakat untuk merangkul sistem ekonomi modern di sektor perhotelan lokal (Kurniawan, 2025). Oleh karena itu, pengembangan daya tarik Buwun Mas mutlak tidak

boleh dilepaskan dari konteks integrasi proteksi lingkungan dan penguatan kapasitas sosio-ekonomi penduduk setempat (Maradita & Aprirachman, 2024).

Lebih spesifik lagi, potensi ekowisata hutan mangrove di Desa Buwun Mas menjadi elemen krusial yang dapat berfungsi ganda sebagai benteng ekologi pesisir dan atraksi wisata edukasi. Mangrove ini tidak hanya beroperasi sebagai penyerap emisi karbon yang efektif, tetapi juga sebagai habitat bagi berbagai biota laut dangkal yang menunjang aktivitas nelayan lokal. Keberadaan ekowisata perairan ini harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan agar dapat memberikan indikator kompetitif yang positif terhadap citra destinasi secara keseluruhan di mata wisatawan global pencinta alam (Font et al., 2023). Hal ini sangat sejalan dengan temuan komprehensif bahwa tingkat kesiapan komunitas pada pulau-pulau kecil di Lombok adalah pondasi utama untuk membendung laju degradasi lingkungan akibat aktivitas pariwisata (Sayuti, 2023).

Pelestarian lingkungan pesisir ini pun harus senantiasa dibarengi dengan kebijakan makro pariwisata yang kuat serta manajemen destinasi yang mengatur batasan daya dukung kawasan (Khan et al., 2021). Program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui model pariwisata berbasis desa akan sangat membantu dalam mengubah paradigma intervensi ekstraktif menjadi paradigma restoratif (Lina, 2023). Integrasi strategis antara konservasi bioma mangrove dan pariwisata berkelanjutan pada akhirnya niscaya akan menciptakan nilai tambah ekonomi tanpa mendisrupsi keseimbangan alam di Buwun Mas.

Meskipun Desa Buwun Mas memiliki beragam spektrum keindahan alam yang menakjubkan, terdapat berbagai kendala dan tantangan struktural yang menghambat kelancaran realisasi kawasan tersebut sebagai destinasi unggulan. Salah satu kendala empiris yang paling terasa adalah minimnya kelayakan infrastruktur jalan raya dan fasilitas penunjang higienitas, yang membuat aksesibilitas menuju kawasan tersembunyi tersebut masih tergolong cukup menyulitkan. Evaluasi teknis yang mendalam terhadap aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan ini sangat mendesak untuk segera dikerjakan agar intervensi pembangunan tidak mengorbankan lanskap ekologis (Anggara, Taufik, & Mandala, 2024).

Di samping itu, tingkat literasi digital dan kemampuan branding kawasan masyarakat setempat masih sangat perlu ditingkatkan guna mempromosikan destinasi dengan strategi e-marketing yang presisi di era modern (Kurniawan, 2025). Fenomena ketimpangan mobilitas juga menyebabkan Buwun Mas sering kali hanya menjadi daerah transit sesaat tanpa mampu menahan durasi tinggal (length of stay) wisatawan lebih lama (Raudatul, 2025). Padahal, harmonisasi regulasi dan kolaborasi birokrasi yang konsisten dari pemerintah daerah, swasta, serta pakar akademisi dapat secara jitu menjembatani kesenjangan fasilitas tersebut (Sari, 2024). Jika rentetan permasalahan mendasar ini tidak

ditangani, prospek emas Desa Buwun Mas akan tertinggal jauh di bawah bayang-bayang destinasi lain yang lebih mapan.

Penyelesaian atas berbagai komplikasi kendala tersebut menuntut reorientasi taktik pengembangan pariwisata dengan meletakkan partisipasi masyarakat pedesaan sebagai subjek utama pembangunan tata kelola ruang. Adopsi konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau CBT memberikan ruang otonomi agar warga Desa Buwun Mas mendikte arah perencanaan, eksekusi, dan mekanisme pengawasan kebijakan wisata kawasannya. Intensitas partisipasi akar rumput ini secara logis akan berkorelasi langsung dengan seberapa besar persetujuan normatif warga terhadap investasi infrastruktur berkelanjutan yang digulirkan (Bajrami et al., 2020).

Pendekatan humanistik seperti implementasi kearifan "Patju Radja" yang bertumpu pada asas gotong royong lokal dapat bertransformasi menjadi kerangka teoritis ideal di tengah demografi komunal Sasak (Muhamad & Darmawan, 2025). Peningkatan indeks kesejahteraan wilayah pariwisata pedesaan juga tidak bisa lepas dari lahirnya inkubator wirausahawan desa yang responsif dalam mengoptimalkan kapital sosial yang ada (Utami, Dhewanto, & Lestari, 2023). Apabila pemegang kebijakan luput dalam meningkatkan kapasitas intelegensia dan kesadaran warga komunal, stimulus turisme akan berisiko besar menghasilkan friksi sosial dan pengikisan identitas budaya lokal (Rasoolimanesh, Jaafar, & Ahmad, 2022). Oleh karenanya, pengesahan legalitas dan fasilitasi finansial kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) perintis di Buwun Mas merupakan instrumen kelembagaan yang mutlak diperkuat.

Berdasarkan tinjauan kritis terhadap beraneka ragam literatur kepariwisataan terkini, publikasi ilmiah yang mendedah studi kasus konkrit pengembangan Desa Wisata Buwun Mas melalui lensa keberlanjutan masih sangat minim. Mayoritas manuskrip penelitian terdahulu yang berfokus pada dinamika turisme di Nusa Tenggara Barat masih terbelenggu untuk sekadar mengevaluasi episentrum populer lingkaran Mandalika maupun padatnya kunjungan kepulauan Gili (Rosalina, Dupre, & Wang, 2021). Beberapa literatur awal yang membedah Lombok Barat pun dominan melakukan asesmen kesiapan psikososial demografi secara makro di pulau-pulau kecil tanpa mengulik secara spesifik pada perpaduan agrowisata dan perbukitan (Sayuti, 2023).

Terdapat pula diskursus yang menekankan skema triple bottom line sebagai kerangka solutif, namun pemetaan geografisnya tertuju ke kawasan kepulauan Sumbawa, bukan rute ekosistem di Sekotong (Maradita & Aprirachman, 2024). Begitu pula dengan analisis pola spasial dan rantai mobilitas yang lebih memfokuskan optiknya pada perpindahan lintas kabupaten alih-alih merespons arus pelancong internal pada satu spot rintisan (Raudatul, 2025). Adanya gap ilmiah ini menegaskan tingginya urgensi

untuk melaksanakan riset empiris yang menyeluruh guna membongkar cetak biru paling relevan bagi pertumbuhan Buwun Mas secara integratif. Mengisi ruang kosong pada kanon literatur ini diharapkan bakal menyumbangkan narasi baru yang preskriptif, tepat sasaran, serta koheren menghadapi komersialisasi masa depan.

Dalam agenda menyusun desain kerangka strategi pengembangan yang solutif dan holistik, analisis internal destinasi tentu harus berkoalisi dengan kapabilitas transformasi digital di pasar turisme abad ini. Intervensi platform ekosistem digital bukan cuma ditujukan demi simplifikasi arus promosi visual, tetapi lebih esensial sebagai auditor akuntabilitas layanan perhotelan dan akomodasi lokal (homestay) milik rakyat (Kurniawan, 2025). Pengadopsian instrumen penilaian daya saing berkelanjutan berskala kuantitatif juga dipercaya memampukan para stakeholder untuk menavigasi fluktuasi indeks kompetisi destinasi perdesaan (Font et al., 2023).

Di lini yang lebih luas, kemitraan strategis yang terajut harmonis di antara regulasi desentralisasi pemerintah provinsi dengan daya lenting masyarakat akar rumput berfungsi vital menetralkan interupsi kebijakan (Khan et al., 2021). Penyelarasan konstruksi yang membaurkan keelokan alam naturalisasi dengan perbaikan koridor perhubungan darat sangat bersinergi pada teori fungsional 4A demi merealisasikan kepuasan turis (Anggara, Taufik, & Mandala, 2024). Lewat sinergitas mutakhir antara literasi teknologi informasi, kalkulasi ekologi presisi tinggi, dan tata laksana komite kerakyatan, rute pariwisata Desa Buwun Mas digaransi mendapat standing unggul pada peta domestik. Manuver transisi proaktif ini juga akan difungsikan sebagai benteng protektif supaya entitas desa perintis ini tak terseret pada pusaran degradasi maupun erosi eksistensi kulturalnya kelak.

Berangkat dari rentetan deskripsi rasionalisasi urgensi konseptual serta inventarisasi problematika yang tersaji, studi ini dieksekusi demi membedah struktur daya magnet wisata Desa Buwun Mas secara radikal. Destinasi final dari penulisan korpus ilmiah ini adalah mendedahkan proyeksi integrasi manajemen kawasan yang diorientasikan untuk mengaktualisasikan paradigma pariwisata berkelanjutan pembawa faedah tripartit: ekonomi, sosiologis, dan biosfer (Sari, 2024). Investigasi riset ini pula berkonsentrasi memproyeksikan matriks kolaborasi multidimensi yang dicanangkan mampu mendongkrak denyut nadi pembangunan ekonomi sirkular namun nir-destruksi kearifan leluhur.

Secara operasional, pengaktifan mesin produktivitas finansial pedesaan bermodalkan inkubasi entrepreneurial diangkat sebagai poros vital penunjang pelestarian estetika pantai maupun perbukitan (Utami, Dhewanto, & Lestari, 2023). Resolusi komprehensif dari kompilasi keilmuan ini diyakini menyuntikkan kontribusi teoretis progresif terhadap ranah ilmu kepariwisataan kerakyatan

sekaligus menelurkan embrio fungsional Community-Based Tourism (Lina, 2023). Rekomendasi manajerial yang termaktub nantinya wajib dialihfungsikan selaku pedoman normatif bagi aparat desa otoritatif, spekulasi investasi, beserta akademisi universitas dalam menyikapi iklim turisme pasca-pandemi (Gössling, Scott, & Hall, 2021). Ekspektasi pamungkasnya, Desa Buwun Mas kelak tidak sekadar dikenal publik sebagai oase geografi perawan tropis, melainkan menjelma menjadi pusaka percontohan sejati untuk persistensi swadaya manusia dalam merawat ekuilibrium bumi.

METODE

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik (intrinsic case study). Pemilihan desain studi kasus didasarkan pada pedoman Yin (2018), yang menyatakan bahwa studi kasus sangat tepat digunakan untuk mengeksplorasi fenomena kontemporer secara mendalam di dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena (potensi pariwisata berkelanjutan) dan konteks (Desa Buwun Mas) tidak terlihat secara tegas. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi kelayakan komponen dasar pariwisata (4A: Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary) dan integrasinya dengan prinsip keberlanjutan. Modifikasi relevan dari pedoman umum studi kasus dilakukan dengan membatasi ruang lingkup observasi spasial secara eksklusif pada zona yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat untuk kawasan Sekotong, guna memastikan batasan kasus yang diteliti tetap presisi dan terukur.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder dilaksanakan selama periode tiga bulan dengan mengadopsi prosedur triangulasi teknik yang direkomendasikan oleh Creswell dan Poth (2018). Teknik utama yang digunakan meliputi: (i) Wawancara mendalam semi-terstruktur, peneliti mengaplikasikan teknik purposive sampling untuk memilih informan kunci yang dinilai memiliki otoritas dan pengetahuan empiris mengenai tata kelola Desa Buwun Mas. Informan tersebut terdiri dari Kepala Desa Buwun Mas, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, serta dua orang tokoh adat Sasak setempat. Wawancara berdurasi 45-60 menit dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang berfokus pada persepsi masyarakat terhadap dampak ekonomi turisme, tantangan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan. Seluruh proses wawancara direkam secara audio dengan persetujuan (informed consent) informan dan ditranskrip secara verbatim. (ii) Observasi partisipatif moderat, observasi lapangan difokuskan pada pemetaan empat komponen destinasi (4A). Peneliti menggunakan instrumen lembar

observasi checklist (modifikasi dari instrumen audit destinasi wisata) untuk mendokumentasikan kondisi faktual atraksi alam (savana dan mangrove), aksesibilitas fisik (kualitas aspal dan rambu penunjuk jalan), ketersediaan amenitas (fasilitas sanitasi dan homestay), serta layanan pendukung (ancillary). (iii) Studi dokumentasi, data sekunder dihimpun melalui peninjauan arsip resmi, termasuk Profil Desa Buwun Mas tahun terakhir, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Daerah, dan peta topografi kawasan wisata.

Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: (i) Kondensasi data (data condensation), transkrip wawancara dan catatan lapangan (field notes) diseleksi dan difokuskan secara manual. Peneliti melakukan pengkodean (coding) tingkat pertama secara induktif untuk mengidentifikasi satuan makna yang muncul, dilanjutkan dengan pengkodean tingkat kedua (pembuatan tema) yang dikelompokkan ke dalam kategori tata kelola keberlanjutan (ekonomi, ekologi, sosial-budaya) dan kesiapan komponen 4A. (ii) Penyajian data (data display), tema-tema yang telah dikodekan divisualisasikan menggunakan matriks kualitatif dan diagram jaringan (network display) untuk melihat benang merah antara regulasi pemerintah, inisiatif Pokdarwis, dan kendala fisik di lapangan. Pemetaan ini esensial untuk menemukan gap antara potensi alam dan realitas tata kelola. (iii) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), verifikasi temuan dilakukan dengan mengonfrontasi hasil matriks data terhadap teori pariwisata berkelanjutan dan Community-Based Tourism (CBT).

Untuk menjamin tingkat kepercayaan (trustworthiness) dan agar penelitian ini reproduisibel, uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan perspektif aparat desa, Pokdarwis, dan pemerintah daerah) dan triangulasi teknik (mengonfrontasi hasil wawancara dengan temuan observasi fisik dan dokumen Rencana Tata Ruang). Selain itu, prosedur member checking dilakukan dengan mengembalikan draf transkrip awal kepada dua informan kunci (Ketua Pokdarwis dan Kepala Desa) untuk memvalidasi akurasi interpretasi peneliti terhadap pernyataan mereka.

PEMBAHASAN

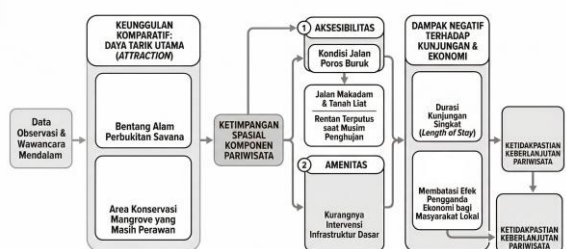
Bagian ini menguraikan temuan empiris di lapangan yang dianalisis secara mendalam untuk menjawab bagaimana dan mengapa potensi alam Desa Buwun Mas dapat atau belum sepenuhnya merepresentasikan prinsip pariwisata berkelanjutan. Pemaparan dibagi berdasarkan hasil tinjauan spasial infrastruktur dan evaluasi kelembagaan lokal dengan

mengonfrontasikannya terhadap literatur kepariwisataan mutakhir.

Evaluasi Komponen 4A pada Ekowisata Buwun Mas

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, daya tarik utama (attraction) Desa Buwun Mas secara mutlak terletak pada bentang alam perbukitan savana dan area konservasi mangrove yang masih perawan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosalina, Dupre, dan Wang (2021) yang menegaskan bahwa lanskap alam pedesaan yang belum terkomersialisasi merupakan magnet utama bagi ceruk pasar wisatawan yang mencari otentisitas ekologi. Namun, keunggulan komparatif dari alam ini tidak serta-merta menjamin keberlanjutan karena tingginya ketimpangan pada pemenuhan aspek aksesibilitas. Kondisi jalan poros yang buruk di Buwun Mas mengonfirmasi postulat teoritis dari Anggara, Taufik, dan Mandala (2024), di mana kegagalan penyediaan aksesibilitas yang layak akan secara langsung mendegradasi nilai jual dari atraksi itu sendiri dan menyulitkan pencapaian pariwisata berkelanjutan.

Kelambanan pembangunan aksesibilitas ini berakar pada status geografis Buwun Mas sebagai area penyangga administratif, sebuah fenomena marginalisasi spasial yang juga secara kritis disoroti dalam temuan Raudatul (2025) terkait polarisasi dan ketimpangan mobilitas turis di regional Lombok. Akibat dari isolasi infrastruktur ini, keterbatasan amenitas seperti ketiadaan sanitasi publik menjadi tidak terhindari karena minimnya stimulus investasi eksternal yang masuk ke desa. Lebih jauh lagi, ketiadaan fasilitas ini memicu perilaku wisatawan yang membuang limbah sembarangan di area savana, sebuah degradasi lingkungan akibat absennya infrastruktur yang sangat selaras dengan peringatan empiris dalam studi manajemen daya dukung destinasi oleh Khan et al. (2021).



Gambar 1. Pemetaan Potensi dan Hambatan Spasial Pariwisata Desa Buwun Mas

Analisis kausalitas dari kondisi di atas mengungkapkan bahwa kelambanan pembangunan aksesibilitas ini berakar pada status geografis Buwun Mas yang secara administratif berada di area perbatasan dan zona penyangga, sehingga alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali tidak memprioritaskan kawasan tersebut dibandingkan destinasi mapan seperti Senggigi. Akibatnya, keterbatasan amenitas seperti

ketiadaan pasokan air bersih yang konsisten dan fasilitas sanitasi publik yang memadai di sekitar area savana terjadi karena minimnya stimulus investasi dari luar yang enggan masuk akibat akses jalan yang buruk. Ketidadaan fasilitas pendukung ini secara langsung menciptakan beban ekologis, di mana wisatawan cenderung membuang limbah secara sembarangan di area konservasi alam. Oleh karena itu, tanpa adanya rekonstruksi aksesibilitas yang memadai, eksploitasi keindahan alam Buwun Mas hanya akan memicu degradasi lingkungan tanpa memberikan kompensasi ekonomi yang setimpal bagi desa.

Integrasi Tata Kelola Berbasis Masyarakat (CBT) dan Keberlanjutan

Sinergi Kelembagaan dan Partisipasi Lokal

Pengembangan pariwisata yang tangguh tidak dapat dilepaskan dari kapasitas otonom masyarakat lokal, di mana, untuk kasus Buwun Mas, benteng perlindungan ekologis ini direpresentasikan melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi dan kesadaran manajemen masyarakat masih sangat reaktif. Temuan ini secara langsung menguatkan kesimpulan empiris dari Sayuti (2023) yang menemukan bahwa tingkat kesiapan komunitas (community readiness) di pulau-pulau kecil Lombok masih menjadi kendala fundamental dalam menghadapi transisi turisme menuju tahap berkelanjutan. Minimnya literasi tata kelola yang dibarengi dengan ketiadaan awig-awig (peraturan adat/desa) tentang zonasi ruang wisata ini berbanding terbalik dengan prasyarat kesuksesan partisipasi lokal yang dirumuskan secara rigid oleh Rasoolimanesh, Jaafar, dan Ahmad (2022). Implikasinya, rendahnya kapasitas finansial kelembagaan Pokdarwis Buwun Mas bermuara pada stagnasi penyediaan fasilitas komunal, sebuah stagnasi yang umum terjadi pada fase inkubasi kewirausahaan pedesaan di negara berkembang (Utami, Dhewanto, & Lestari, 2023).

Tabel 1. Matriks Evaluasi Kesiapan Kelembagaan Pokdarwis Buwun Mas

Indikator Kelembagaan	Kondisi Faktual di Buwun Mas	Status Kesiapan
Legalitas & Struktur	Telah terbentuk, SK Kepala Desa tersedia	Menengah
Kapasitas Finansial	Bergantung pada donasi insidental, tidak ada kas tetap	Rendah
Literasi Pemasaran Digital	Promosi sporadis via media sosial personal	Rendah
Kemitraan Eksternal	Belum ada MoU dengan agen perjalanan atau NGO	Rendah

Sumber: Diadaptasi dari Modul Tata Kelola Destinasi UNWTO, 2024

Tabel 1 memaparkan hasil evaluasi kesiapan kelembagaan Pokdarwis Buwun Mas yang diukur

melalui empat indikator utama tata kelola destinasi wisata. Secara administratif, aspek legalitas dan struktur organisasi telah mencapai tingkat kesiapan menengah berkat adanya legitimasi berupa Surat Keputusan (SK) resmi dari otoritas Kepala Desa. Namun demikian, pengakuan yuridis di atas kertas tersebut ternyata belum sejalan dengan kapasitas operasional kelompok di lapangan yang terbukti masih sangat terbatas. Kondisi timpang ini ditunjukkan secara gamblang oleh rendahnya kapasitas finansial institusi yang hingga kini hanya bertumpu pada aliran donasi insidental tanpa memiliki sumber kas tetap. Lebih jauh lagi, minimnya literasi pemasaran digital dan ketiadaan kemitraan eksternal yang strategis membuat upaya promosi destinasi desa berjalan sangat sporadis serta kurang terarah. Kesimpulannya, kesenjangan yang signifikan antara kepemilikan legalitas formal dan realitas kesiapan manajerial ini merupakan tantangan mendasar yang harus segera direstrukturisasi agar prinsip pariwisata berkelanjutan dapat benar-benar terealisasi di Buwun Mas.

Tabel 2. Dampak Tata Kelola Terkini terhadap Aspek Ekonomi dan Ekologi

Aspek Keberlanjutan	Temuan Dampak Positif	Temuan Dampak Negatif (Risiko)
Ekonomi Lokal	Munculnya pedagang asongan lokal di sekitar pantai	Ketimpangan pendapatan; minimnya homestay milik warga
Ekologi/Lingkungan	Kesadaran menanam bibit mangrove oleh pemuda desa	Risiko erosi savana akibat aktivitas kendaraan off-road liar

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Tabel 2 menguraikan secara komprehensif implikasi empiris dari tata kelola pariwisata terkini di Desa Buwun Mas terhadap dimensi ekonomi lokal dan kelestarian ekologi. Pada aspek ekonomi, kehadiran aktivitas pariwisata memang telah menstimulasi dampak positif awal berupa kemunculan peluang usaha mikro bagi masyarakat, seperti menjamurnya pedagang asongan di sekitar pesisir pantai. Namun demikian, ketiadaan regulasi kelembagaan yang terstruktur menyebabkan pertumbuhan ini diiringi oleh risiko negatif berupa ketimpangan pendapatan, mengingat warga lokal yang masih sangat minim memiliki kapasitas finansial untuk menyediakan fasilitas homestay. Fenomena polarisasi ekonomi mikro ini sejalan dengan temuan Raudatul (2025), yang menggarisbawahi bahwa tanpa intervensi tata kelola partisipatif, distribusi kesejahteraan destinasi rintisan cenderung berjalan lambat dan tidak merata.

Sementara itu, pada dimensi ekologi, inisiatif swadaya pemuda desa dalam menanam bibit mangrove menjadi indikator adaptif atas masih berfungsinya kapital sosial kultural di tengah ancaman degradasi lingkungan. Sayangnya, absennya awig-awig atau aturan zonasi perdesaan yang tegas justru memicu dampak destruktif paradoksal, yakni tingginya risiko erosi di sabuk hijau savana akibat eksploitasi jalur kendaraan off-road ilegal. Rantai kausalitas ini semakin mempertegas argumen Sayuti (2023) bahwa rendahnya kesiapan komunitas dalam merumuskan batas daya dukung lingkungan secara yuridis akan otomatis mengakselerasi laju kerusakan ekosistem lokal.

Pembahasan mendalam mengenai anomali antara tingginya potensi visual alam Desa Buwun Mas dan minimnya durasi tinggal wisatawan dapat dijelaskan melalui lensa marginalisasi spasial dan defisit kelayakan infrastruktur. Secara konseptual, fenomena keengganan investor eksternal untuk mendanai pembangunan amenitas di kawasan ini terjadi karena tingginya biaya transaksi logistik yang diakibatkan oleh buruknya kualitas jalan poros penghubung utama. Rantai kausalitas ini secara lugas mengonfirmasi postulat empiris dari Sharpley (2020), yang menegaskan bahwa seindah apa pun sebuah atraksi pedesaan, ketiadaan aksesibilitas fisik yang mumpuni akan secara otomatis menekan efek pengganda ekonomi (economic multiplier effect) ke titik terendah.

Lebih jauh lagi, isolasi infrastruktur ini memaksa Buwun Mas hanya berfungsi sebagai rute transit sesaat, yang mana hal ini secara langsung membantah asumsi tradisional bahwa keberadaan savana eksotis secara mandiri mampu menciptakan pariwisata berkelanjutan tanpa intervensi tata ruang arsitektural (Saarinen, 2019). Akibat absennya fasilitas sanitasi publik yang semestinya dibangun oleh stimulus modal eksternal maupun daerah, beban kerentanan ekologis langsung ditanggung oleh lingkungan setempat ketika wisatawan berkunjung. Kondisi nir-fasilitas ini merepresentasikan kegagalan manajemen daya dukung fisik destinasi tingkat dasar, sebuah anomali manajemen yang sangat diwanti-wanti akan daya rusaknya dalam literatur tata kelola persampahan pariwisata pedesaan (Gössling & Peeters, 2015). Oleh karena itu, stagnasi pertumbuhan ekonomi di Buwun Mas bukanlah disebabkan oleh kurangnya daya pikat alam, melainkan murni diakibatkan oleh marginalisasi kebijakan alokasi infrastruktur yang gagal menjembatani kesenjangan fasilitas antara pusat pertumbuhan kabupaten dan kawasan pinggiran (Hall, 2019).

Kelemahan struktural pada anatomi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Buwun Mas memberikan penjelasan rasional mengenai mengapa partisipasi masyarakat lokal masih cenderung reaktif dan jauh dari cita-cita otonomi pengelolaan ekosistem wisata. Akar dari disfungsi kelembagaan ini terletak pada ketimpangan antara pemberian legalitas formal oleh instansi tingkat desa dengan absennya injeksi

kapasitas manajerial serta modal finansial yang persisten dari tingkat kabupaten. Kondisi asimetris tata kelola ini sangat selaras dengan argumentasi kritis Giampiccoli dan Mtapuri (2021), yang mendalilkan bahwa pengesahan organisasi akar rumput tanpa disertai literasi kapital dan kewirausahaan modern hanya akan melahirkan pseudo-partisipasi di dalam skema Community-Based Tourism (CBT). Akibatnya, tanpa memiliki arus kas mandiri yang stabil dan kemitraan strategis dengan agen perjalanan profesional, Pokdarwis terisolasi dari pusaran ekosistem pemasaran digital, sehingga mereka gagal mengkapitalisasi pergerakan tren pariwisata pasca-pandemi secara optimal.

Kegagalan mengonversi popularitas organik lanskap alam di media sosial menjadi tingkat kunjungan (conversion rate) yang berkualitas ini memvalidasi teori kerentanan daya saing destinasi pedesaan di era digitalisasi (Buhalis, 2020). Di samping itu, ketiadaan pedoman operasional standar dari dinas terkait mengakibatkan masyarakat lokal sering kali meraba-raba arah dan batas pengembangan desa wisata mereka, yang mana merupakan manifestasi dari kegagalan proses transfer pengetahuan secara top-down (Dodds & Butler, 2019). Resolusi mendesak atas kebuntuan institusional ini mutlak membutuhkan kehadiran katalisator eksternal, seperti jaringan pakar akademisi maupun lembaga non-pemerintah, untuk secara intensif mendampingi perumusan tata kelola lokal yang jauh lebih adaptif, transparan, dan terdesentralisasi (Cheer & Lew, 2018).

Pada dimensi persinggungan antara eskalasi aktivitas ekonomi mikro dan upaya konservasi, terungkap adanya paradoks ekologis yang tajam di mana inisiatif pelestarian akar rumput berbenturan langsung dengan ancaman komersialisasi rekreasi yang tak teregulasi. Hadirnya komunitas pedagang asongan di satu sisi mengindikasikan mulai berjalannya roda ekonomi kerakyatan, namun di sisi lain, absennya regulasi pembatasan perilaku wisatawan (awig-awig) memicu tragedi kerusakan sabuk hijau perbukitan akibat aktivitas off-road liar oleh pengunjung.

Mekanisme sebab-akibat destruktif ini mendemonstrasikan secara nyata berlakunya fenomena tragedy of the commons dalam tata kelola pariwisata komunal, di mana eksploitasi sumber daya daya tarik milik bersama yang miskin aturan niscaya akan meruntuhkan ekuilibrium ekosistem dasar kawasan tersebut (Cole, 2012). Kendati kelompok pemuda setempat telah merespons krisis degradasi tersebut melalui intervensi penanaman mangrove secara gotong royong, tindakan kuratif ini tidak akan pernah berdaya guna dalam jangka panjang jika tidak dibentengi oleh ketegasan regulasi zonasi peruntukan yang mengikat (Higgins-Desbiolles, 2020). Deretan temuan observasi ini memberikan justifikasi empiris yang memperkuat postulat akademis Higham (2021), yang meyakini bahwa ketahanan ekologis di destinasi pesisir dan kepulauan tidak bisa disandarkan semata

pada kearifan moral kultural lokal yang bersifat sporadis. Ketahanan tersebut secara mutlak harus diinstitusionalisasikan ke dalam sebuah produk tata tertib desa yang memiliki konsekuensi sanksi hukum yang rasional. Pengesahan instrumen kelembagaan berupa peraturan desa yang secara rigid merinci batas ambang daya dukung lingkungan (carrying capacity) wajib dieksekusi guna mencegah privatisasi atau perusakan lanskap Buwun Mas oleh oknum tak bertanggung jawab di masa mendatang (Fennell, 2020). Keberhasilan mensinergikan otonomi hukum perdesaan, literasi tata kelola ekonomi kewirausahaan pro-rakyat, dan penyediaan aksesibilitas infrastruktur yang berkeadilan merupakan fondasi esensial yang akan menentukan apakah Desa Buwun Mas kelak mampu bertransformasi menjadi representasi hakiki dari pariwisata berkelanjutan atau justru sekadar menjadi monumen kegagalan eksploitasi alam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi pengembangan daya tarik wisata alam di Desa Buwun Mas, penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya daya tarik alam berupa keindahan perbukitan savana dan kelestarian ekosistem mangrove tidak berbanding lurus dengan pemenuhan komponen pariwisata lainnya. Keunggulan atraksi tersebut mengalami ketimpangan yang tajam akibat buruknya kelayakan aksesibilitas jalan poros dan ketiadaan amenitas dasar, seperti fasilitas sanitasi publik. Kondisi infrastruktur yang minim ini secara langsung membatasi durasi kunjungan wisatawan sehingga efek pengganda ekonomi (multiplier effect) bagi warga desa tidak dapat terealisasi secara optimal. Selain itu, upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan sangat terhambat oleh kelemahan tata kelola kelembagaan lokal. Meskipun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) telah diakui secara legal melalui surat keputusan desa, institusi ini masih belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan operasional Community-Based Tourism (CBT) akibat defisit pada kemandirian finansial, literasi pemasaran digital, dan ketiadaan kemitraan strategis dengan investor maupun agen perjalanan profesional.

Kerapuhan institusional dan manajerial tersebut semakin diperparah oleh ancaman degradasi ekologis yang muncul akibat kekosongan regulasi. Ketidadaan peraturan desa atau tata tertib lokal (awig-awig) yang mengatur zonasi pelestarian lingkungan secara tegas telah memicu kerusakan fisik secara nyata, yang dibuktikan dengan terjadinya erosi di area sabuk hijau savana akibat eksploitasi jalur kendaraan off-road ilegal oleh pengunjung. Secara keseluruhan, transformasi Desa Buwun Mas menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pesona alamnya semata. Keberhasilan pengembangan kawasan ini mutlak membutuhkan intervensi kolaboratif secara simultan, di mana pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, sementara aparat

desa wajib segera mengesahkan regulasi pelestarian lingkungan yang mengikat guna melindungi lanskap ekologis dari ancaman eksploitasi pariwisata massal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, B., Taufik, M., & Mandala, O. S. (2024). Eksplorasi Potensi Pengembangan Wisata Alam Menggunakan Pendekatan 4A dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination*, 3(2), 33-39. <https://doi.org/10.55123/toba.v3i2.3515>
- Bajrami, D. D., Radosavac, A., Cimbaljevi?, M., Tretiakova, T. N., & Syromiatnikova, Y. A. (2020). Determinants of residents support for sustainable tourism development: Implications for rural communities. *Sustainability*, 12(22), 116. <https://doi.org/10.3390/su12229438>
- Buhalis, D. (2020). Technology in tourism-from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: a perspective article. *Tourism Review*, 75(1), 267-272. <https://doi.org/10.1108/TR-06-2019-0258>
- Cheer, J. M., & Lew, A. A. (2018). Understanding tourism resilience: Adapting to social, political and economic change. In *Tourism, Resilience and Sustainability* (pp. 3-17). Routledge.
- Cole, S. (2012). A political ecology of water equity and tourism: A case study from Bali. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 1221-1241. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.01.003>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dodds, R., & Butler, R. (2019). The phenomena of overtourism: A review. *International Journal of Tourism Cities*, 5(4), 519-528. <https://doi.org/10.1108/IJTC-06-2019-0090>
- Fennell, D. A. (2020). *Tourism ethics* (2nd ed.). Channel View Publications.
- Font, X., Torres-Delgado, A., Crabolu, G., Palomo Martinez, J., Kantanbacher, J., & Miller, G. (2023). The impact of sustainable tourism indicators on destination competitiveness: the European Tourism Indicator System. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(7), 1608-1630. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1910281>
- Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2021). Community-based tourism: An exploration of the concept(s) from a political perspective. *Tourism Review International*, 25(1), 29-43. <https://doi.org/10.3727/154427220X15911855474661>
- Gössling, S., & Peeters, P. (2015). Assessing tourism's global environmental impact 1900–2050. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(5), 639-659. <https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1008500>
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2021). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1-20. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>
- Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 agenda and the managerial ecology of sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1044-1060. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1560456>
- Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. *Tourism Geographies*, 22(3), 610-623. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1757748>
- Higham, J. (2021). Tourism, climate change and the ocean. In *Routledge Handbook of Marine and Coastal Tourism* (pp. 411-424). Routledge.
- Khan, M. R., Khan, H. U. R., Lim, C. K., Tan, K. L., & Ahmed, M. F. (2021). Sustainable tourism policy, destination management and sustainable tourism development: A moderated-mediation model. *Sustainability*, 13(21), 12156. <https://doi.org/10.3390/su132112156>
- Kurniawan, P. R. (2025). Leveraging Digital Transformation For Sustainable Tourism: A Case Study of the Hospitality Sector in North Lombok. *DIGIBIZ: Journal of Digital Business*, 1(1). <https://doi.org/10.58258/v1i107303>
- Lina, F. Y. (2023). Community-Based Tourism (CBT): A Community Development Tool. *European Journal of Business and Management*, 15(17). <https://doi.org/10.7176/ejbm/15-17-01>
- Maradita, F., & Aprirachman, R. (2024). Triple Bottom Line Model as a Solution for Sustainable Tourism Management in the SAMOTA Area, Sumbawa Regency: Economic, Social, and Environmental Perspectives. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 9(1). <https://doi.org/10.38043/jimb.v9i1.5554>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhamad, M., & Darmawan, A. (2025). Sustainable Tourism Development Through The Community-Based "Patju Radja" Concept In West Lombok. *Jurnal Toursci*, 2(4), 259-268. <https://doi.org/10.62885/toursci.v2i4.625>
- Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., & Ahmad, A. G. (2022). Community participation and sustainable tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(1), 1-19. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1891238>
- Raudatul, R. (2025). Tourist Mobility for Sustainable Tourism Development in the Lombok–Sumbawa Region. *Aletheia*, 2(12), 121-130. <https://doi.org/10.63892/aletheia.2.2025.121-130>
- Rosalina, P. D., Dupre, K., & Wang, Y. (2021). Rural tourism: A systematic literature review on definitions and challenges. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 47, 134-149. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.03.001>
- Saarinen, J. (2019). Communities and sustainable tourism development: Community impacts and local benefit creation in tourism. In *A Research Agenda for Sustainable Tourism* (pp. 206-222). Edward Elgar Publishing.
- Sari, A. R. (2024). Multi-Sector Collaboration for Sustainable Tourism Management: Insights from Central Lombok Regency, Indonesia. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 16(3), 239-254. <https://doi.org/10.54783/jv.v16i3.1262>
- Sayuti, R. H. (2023). Community Readiness in Implementing Sustainable Tourism on Small Islands: Evidence from Lombok, Indonesia. *Sustainability*, 15(12), 9725. <https://doi.org/10.3390/su15129725>
- Sharpley, R. (2020). Tourism, sustainable development and the theoretical divide: 20 years on. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(11), 1932-1946. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1779732>
- Utami, D. D., Dhewanto, W., & Lestari, Y. D. (2023). Rural tourism entrepreneurship success factors for sustainable tourism village: Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2180845>